

AKTIVISME DIGITAL PUBLIK SEBAGAI BENTUK PROTES TERHADAP PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI INDONESIA

Nadia Husna Rhamdania

Universitas Islam Indonesia

23323160@students.uii.ac.id

Tyas Mutiara Marsha

Universitas Islam Indonesia

23323187@students.uii.ac.id

Theona Putri Trisnawati

Universitas Islam Indonesia

23323080@students.uii.ac.id

Nadia Rahma Tri Anggraini

Universitas Islam Indonesia

22323052@students.uii.ac.id

Hasbi Aswar

Universitas Islam Indonesia

hasbiaswar@uii.ac.id

Submitted: June 17th, 2026; Revised: October 26th, 2026; Accepted: October 28th, 2026

Abstract

The Free Nutritious Food Program (MBG) launched by the Prabowo Subianto administration in 2025 is a strategic policy to address nutritional issues such as stunting and malnutrition in Indonesia. However, its implementation has sparked various public responses, particularly in the form of protest movements on social media. This phenomenon is important to examine considering that social media now functions as a new space for shaping public opinion and an arena for policy contestation. The urgency of this research lies in the increasing criticism of the MBG, which not only highlights the technical aspects of implementation but also touches on issues of budget transparency, policy priorities, and trust in the government. This study aims to analyze the dynamics of the social media protest movement against the MBG and its impact on the legitimacy of public policy. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach, through data collection from social media platforms TikTok, Instagram, and X using a digital activism approach. Initial findings indicate that protests on social media have grown massively and are loosely organized, with the main narratives related to budget waste, inaccurate targeting, and potential corruption. This study demonstrates that social media plays a significant role in shaping public discourse and political pressure on the government. Therefore, transparency and effective public communication are key to maintaining policy legitimacy.

Keywords: Digital Activism, Free Nutritious Meals (MBG), Government legitimacy, Social media.

Abstrak

Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto pada tahun 2025 merupakan kebijakan strategis untuk mengatasi permasalahan gizi seperti stunting dan malnutrisi di Indonesia. Namun, pelaksanaannya memicu berbagai respon publik, khususnya dalam bentuk gerakan protes di media sosial. Fenomena ini menjadi penting dikaji mengingat sosial media kini berfungsi sebagai ruang baru dalam pembentukan opini publik sekaligus arena kontestasi kebijakan. Urgensi penelitian ini terletak pada meningkatnya kritik terhadap MBG yang tidak hanya menyoroti aspek teknis pelaksanaan, tetapi juga menyentuh isu transparansi anggaran, prioritas kebijakan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika gerakan protes media sosial terhadap MBG serta dampaknya terhadap legitimasi kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data dari platform media sosial Tiktok, Instagram, dan X menggunakan pendekatan aktivisme digital. Temuan awal menunjukkan bahwa protes di media sosial berkembang secara masif dan terorganisir secara longgar, dengan narasi utama terkait pemborosan anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta potensi korupsi. Kajian ini menunjukkan bahwa media sosial memainkan peran signifikan dalam membentuk diskursus publik dan tekanan politik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, transparansi dan komunikasi publik yang efektif menjadi kunci dalam menjaga legitimasi kebijakan.

Kata kunci: Aktivisme digital, Kebijakan publik, Legitimasi pemerintah, Makanan Bergizi Gratis (MBG), Media sosial

PENDAHULUAN

Indonesia hingga saat ini masih dihadapkan pada persoalan pemenuhan gizi masyarakat yang belum merata. Berdasarkan data tahun 2023, prevalensi stunting di tanah air berada di angka 21,6% dan wasting sebesar 7,1%. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk mengambil langkah intervensi nutrisi secara terstruktur. Sebagai respons atas tantangan ini, pemerintah meluncurkan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis guna memperbaiki gizi publik, mendukung penyiapan sumber daya manusia menjelang Visi Indonesia Emas 2045, serta berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2: Tanpa Kelaparan (A, 2021).

Akan tetapi, sejak awal penerapannya, program MBG tidak lepas dari kendala operasional. Pelaksanaan di lapangan diwarnai risiko keracunan makanan yang berdampak langsung pada kesehatan para siswa, dinamika sosial di lingkungan sekolah, hingga efektivitas kegiatan belajar-mengajar. Berbagai persoalan teknis ini memicu kegelisahan warga yang kemudian meluap ke ruang digital. Kehadiran kebijakan MBG mendadak memantik perbincangan hangat di media sosial X (Twitter) yang mencatatkan 24,7 juta pengguna aktif di Indonesia (Abner & Morin, n.d.).

Kondisi ini sejalan dengan sejumlah literatur yang menyoroti pergeseran media sosial sebagai medium protes warga di era modern. Media digital tidak sekadar dipakai untuk bertukar kabar, melainkan telah menjelma menjadi sarana konsolidasi serta pembentukan gerakan sosial secara terbuka. Dalam ranah kebijakan publik, platform jejaring sosial menjadi kanal utama masyarakat untuk menyuarakan kritik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial, di mana keresahan individu dapat dengan cepat tereskalasi menjadi sentimen publik kolektif. Meski demikian, dinamika di media sosial juga menyimpan risiko lahirnya "kebijakan yang serba terburu-buru akibat dorongan viralitas", sehingga berpotensi mengganggu stabilitas tata kelola pemerintahan apabila tidak diimbangi dengan analisis yang kritis dan terukur (Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia (APJII), 2024).

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana gerakan protes digital terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbentuk, berkembang di berbagai platform media sosial, serta menyelaraskan analisisnya terhadap dinamika penolakan publik dan dampaknya bagi legitimasi kebijakan pemerintah di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Cara orang menyuarakan pendapat mereka tentang berbagai masalah publik telah berubah akibat pertumbuhan internet dan media sosial. Saat ini, orang menggunakan saluran digital seperti X (Twitter) dan Instagram selain kelompok formal dan protes untuk menyampaikan tujuan mereka. Fenomena ini disebut sebagai "aktivisme digital," yaitu tindakan menggunakan media digital untuk menyuarakan tuntutan sosial dan politik, kritik, atau dukungan. Adanya media sosial memberikan orang, cara yang lebih cepat dan mudah untuk terlibat dalam masalah publik. Informasi bisa menyebar dalam hitungan menit, sehingga memungkinkan suatu masalah cepat menarik perhatian publik. Selain itu banyak juga aktivitas di media sosial yang tidak selalu menghasilkan kegiatan nyata di dunia nyata (Lim, 2013).

Media sosial bisa digunakan untuk menggalang dukungan publik untuk suatu isu, tentang gerakan Save KPK. Media sosial juga bisa meningkatkan tekanan publik terhadap pemerintah atau institusi tertentu melalui kampanye digital, penggunaan hashtag, dan berbagi informasi. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial telah menjadi alat penting untuk keterlibatan politik (Suwana,

2019). Selain itu, adanya media sosial seperti Instagram dan X (Twitter) memudahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam urusan publik, aktivisme digital turut berkontribusi pada penguatan demokrasi. Media sosial mempermudah orang untuk mengikuti tindakan pemerintah, menyampaikan pendapat, dan memberi kritik. Akibatnya, masyarakat bisa berperan sebagai pengawas kebijakan dan juga sebagai penerima kebijakan (Paskarina, 2020).

Media sosial memiliki pengaruh besar dalam melibatkan generasi muda dalam berbagai gerakan sosial. Media sosial membuat masyarakat mudah menyebarkan informasi, membangun persatuan, dan menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam suatu gerakan. Aktivisme digital diperkuat oleh aksesibilitas dan kecepatan penyebaran informasi (Nugroho, 2025). Bagaimana media sosial bisa mengubah keluhan atau kritik pribadi menjadi gerakan masyarakat yang lebih besar. Kesadaran publik tentang suatu masalah bisa ditingkatkan melalui penggunaan hashtag, petisi online, video kritis, dan konten digital lainnya. Tekanan publik yang mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah bisa muncul ketika banyak pengguna media sosial merespons topik yang sama (Rahayuningsih et al., 2025).

Media sosial sangat banyak digunakan di Indonesia sebagai forum untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Di dunia digital, berbagai tema, termasuk kesehatan, pendidikan, lingkungan, dan kebijakan ekonomi, sering dibahas dan diperdebatkan. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial telah berkembang menjadi ranah publik digital yang memungkinkan orang ikut aktif dalam proses politik. Setelah diluncurkannya Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), berbagai tanggapan publik muncul di media sosial. Karena inisiatif ini dianggap membantu memenuhi kebutuhan gizi anak dan menurunkan angka stunting, sebagian masyarakat mendukungnya. Namun, ada juga yang menyuarakan kekhawatiran tentang kemungkinan masalah dalam pelaksanaan, alokasi dana, metode distribusi, dan kualitas makanan. Setelah dibagikan di media sosial, kekhawatiran ini memicu percakapan publik yang cukup luas (Saputri & Utari, 2026).

Dengan itu, media sosial sangat penting untuk mempengaruhi opini publik, meningkatkan keterlibatan masyarakat, dan mendorong berkembangnya gerakan sosial secara online. Beberapa studi secara khusus telah melihat gerakan protes publik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG), sementara mayoritas masih fokus pada aktivisme internet secara umum. Jadi, tujuan dari

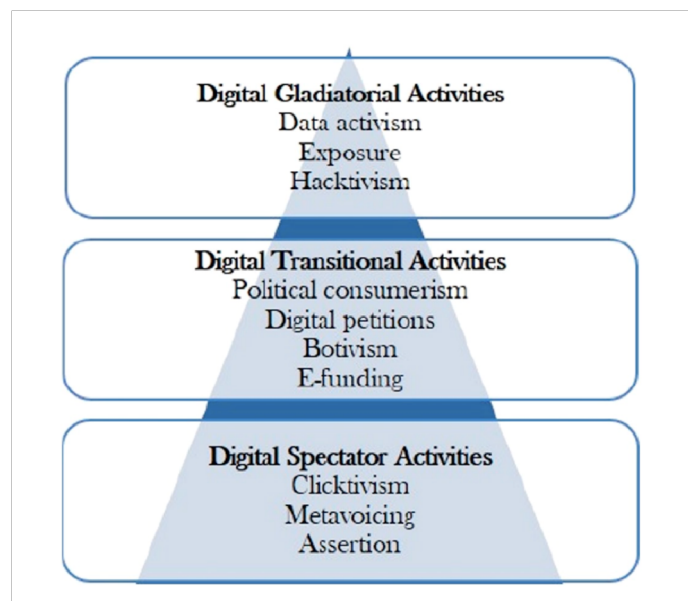
adanya penelitian ini untuk melihat bagaimana gerakan protes di media sosial terhadap MBG berkembang dan bagaimana hal itu mempengaruhi opini publik serta kebijakan pemerintah.

KERANGKA TEORI

Aktivisme digital didefinisikan sebagai gerakan sosial yang memanfaatkan media digital. Awalnya, aktivisme ini dianggap tidak ada bedanya dengan aksi politik tradisional—misalnya, mengirim pesan politik via email disamakan seperti mengirim brosur lewat pos, dan melimpahnya informasi di internet dianggap sekadar memperkuat kondisi yang sudah ada tanpa benar-benar mengubah peta politik. Selain itu, ada pandangan bahwa situs politik tidak terlalu berdampak karena hanya diakses oleh orang-orang yang memang sudah tertarik. Namun, studi terkini menunjukkan bahwa aktivisme digital memiliki perbedaan yang sangat signifikan dibanding aktivisme tradisional.

George, J. J., & Leidner, D. E. (2019) menggunakan teori hierarki partisipasi politik Milbrath untuk memahami aktivisme digital, tetapi memperluasnya agar mencakup organisasi—baik sebagai pelaku maupun target—di samping individu. Kedua konsep ini memiliki kesamaan, yaitu berpola piramida di mana mayoritas orang berada pada level penonton dan jumlahnya makin berkurang di level yang lebih aktif, serta fakta bahwa pelaku di tingkat atas tetap melakukan aktivitas dasar di tingkat bawah. Namun, perbedaan utamanya terletak pada cakupan aktor: teori Milbrath hanya menganalisis individu, sedangkan aktivisme digital juga mencakup organisasi, di mana aksi individu saling mempengaruhi dan membentuk perubahan pada organisasi dari waktu ke waktu.

Gambar 1: Hirarki Aktifisme Digital



Sumber: George, J. J., & Leidner, D. E. (2019) From clicktivism to hactivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*, 29(2), 100249.

Aktivitas dan fungsi penonton digital (*digital spectator*) yang menempati porsi terbesar dalam aktivisme digital dan melibatkan paling banyak orang. Sebagian besar aktivitas media sosial dikategorikan ke dalam tingkat Penonton (*Spectator tier*) dan dibagi menjadi tiga bentuk: *clicktivism*, *metavoicing*, dan *assertion*. Pertama, *Clicktivism* adalah tindakan memberikan "like", *upvote*, atau mengikuti (*following*) akun/unggahan aktivis. Klikativisme memungkinkan seseorang menunjukkan dukungan secara pasif dan terpisah, serta memerlukan sumber daya digital yang sangat minim (cukup akun media sosial, perangkat, dan koneksi internet). Kedua, *Metavoicing* adalah tindakan membagikan (*share/retweet/repost*) dan mengomentari unggahan media sosial milik orang lain. Istilah ini menggambarkan fenomena ruang gema (*echo chamber*) di internet yang berfungsi memperkuat gagasan dan nilai-nilai. Ketiga *Assertion* adalah tindakan ini menggambarkan pembuatan konten media sosial. Ini menginformasikan orang lain melalui media video, audio, gambar, atau teks. Aktivitas pernyataan berkisar dari unggahan atau tweet media sosial orisinal, mengirimkan komunikasi digital orisinal kepada perwakilan, dan terlibat dalam partisipasi elektronik pemerintah.

Level kedua adalah Aktivitas transisi digital (*digital transitional*) berada di antara aktivitas penonton dan aktivitas gladiator. Aktivitas ini membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada

aktivitas penonton dan biasanya memberikan dampak yang lebih kuat namun masih kalah dibandingkan aktivitas gladiator. Beberapa aktivitas mencakup dalam bagian ini: Pertama, Konsumerisme politik. Konsumeris politik mendukung pandangan mereka melalui kebiasaan pembelian yang memungkinkan mereka untuk secara finansial mendukung bisnis yang setuju dengan pandangan mereka (*buycotting*) sambil memboikot perusahaan yang mempromosikan pandangan yang berbeda. Kedua, Petisi digital yaitu Permohonan resmi yang didukung dan ditandatangani oleh banyak orang untuk menunjukkan adanya desakan kolektif terhadap suatu isu. Ketiga, *Botivism* (gabungan dari bot dan aktivis) menggambarkan penggunaan bot (tindakan digital otomatis atau robot digital) untuk komunikasi. Dan ketiga adalah Pendanaan elektronik sebagai penggunaan teknologi untuk menghasilkan pendapatan bagi suatu tujuan. Pendanaan elektronik mencakup berbagai pilihan penghasil pendapatan, dimulai dengan tombol donasi sederhana di situs web yang menyediakan kontribusi moneter langsung.

Level ketiga adalah, Aktivitas Gladiator Digital yang dianggap sebagai aksi aksi langsung di mana para peserta tidak berupaya mempengaruhi perubahan tapi mereka menciptakan perubahan. Dalam aktivisme digital, aktivitas gladiator meliputi aktivisme data, pengungkapan, dan hacktivism: pertama, aktivisme data yang mencakup gerakan umum untuk mempromosikan kekuasaan individu yang lebih besar atas data yang dimiliki orang lain, terutama data yang dimiliki oleh organisasi besar seperti Facebook, Google, dan Amazon, serta data yang dimiliki oleh pemerintah. Kedua adalah Pengungkapan (*Exposure*) adalah penyebaran informasi rahasia tanpa izin, yang juga digambarkan sebagai kebocoran seperti yang melalui *WikiLeaks*, pers, atau media sosial. Terakhir adalah Hacktivism (*Hacktivism*) adalah peretasan untuk mencapai tujuan sosial atau politik. Hacktivist menargetkan pemerintah, organisasi, dan individu. Peretasan dipicu oleh suatu peristiwa atau kebijakan atau ketika satu kelompok tampaknya memperoleh keuntungan atas kelompok lain. Hal ini dilakukan melalui kode komputer yang mengungkap informasi, menghancurkan data, atau mengganggu operasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami dan menjelaskan fenomena protes publik terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang muncul di media sosial. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur atau menghitung suatu fenomena secara statistik, melainkan untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat merespons, mengkritik, dan mengungkapkan pendapat tentang kebijakan MBG melalui berbagai platform media sosial. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan memberikan gambaran sistematis tentang suatu fenomena berdasarkan fakta dan data yang ditemukan. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha menjelaskan bentuk-bentuk gerakan protes digital, faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya protes tersebut, serta dampaknya terhadap opini publik dan kebijakan pemerintah. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal ilmiah, artikel berita online, dan dokumen resmi pemerintah dan konten media sosial yang terkait dengan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Konten media sosial yang dianalisis mencakup postingan, komentar, video, dan penggunaan hashtag yang membahas pelaksanaan program di platform seperti X (Twitter), Instagram, TikTok, dan Facebook. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan pada periode Maret hingga Juni, dengan memanfaatkan sumber data melalui tinjauan pustaka dan dokumentasi. Tinjauan pustaka melibatkan pengumpulan dan mempelajari penelitian sebelumnya yang terkait dengan aktivisme digital, media sosial, gerakan sosial, dan kebijakan publik. Sementara itu, dokumentasi melibatkan pengumpulan informasi dari berita online, dokumen pemerintah, dan konten media sosial yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan analisis konten yang dipilih secara acak dengan memilih dan mengkaji data yang tersedia secara random sesuai dengan topik penelitian. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai tema yang muncul dalam diskusi publik mengenai Program MBG di media sosial. Proses analisis melibatkan pengumpulan data yang relevan, mengelompokkan data berdasarkan tema tertentu seperti kritik terhadap anggaran, kualitas makanan, distribusi program, transparansi pelaksanaan, dan dukungan publik, kemudian menafsirkan makna dari setiap temuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena yang diteliti. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yang melibatkan perbandingan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber berbeda,

seperti jurnal ilmiah, berita online, dokumen resmi pemerintah, dan media sosial. Teknik ini digunakan untuk memastikan data lebih valid dan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif tentang gerakan protes terhadap Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Temuan penelitian kemudian disajikan dalam bentuk analisis deskriptif yang menjelaskan bagaimana gerakan protes digital terhadap Program MBG berkembang di media sosial, faktor-faktor yang mempengaruhi penyebarannya, dan dampaknya terhadap opini publik serta proses pembuatan kebijakan pemerintah. Melalui metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peran media sosial dalam membentuk gerakan protes dan partisipasi publik terkait kebijakan publik di Indonesia.

HASIL DAN DISKUSI

Meskipun diusung sebagai langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan gizi anak dan menekan stunting, pelaksanaan program MBG memicu gelombang kritik di media sosial, terutama X (Twitter) dan Instagram (Rahmah et al., 2025). Penolakan ini berfokus pada alokasi anggaran bernilai ratusan triliun rupiah per tahun yang dikhawatirkan membebani ketahanan fiskal negara, di mana publik menilai dana tersebut lebih mendesak untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, sehingga memicu desakan transparansi (Attar, 2025).

Selain itu, keraguan publik menyangkut efektivitas pembagian makanan gratis dalam mengatasi akar kemiskinan dan masalah gizi yang kompleks, yang berkaitan erat dengan sanitasi serta akses layanan kesehatan (Maliati, 2023). Skala anggaran yang besar juga memicu kecemasan akan risiko penyelewengan dan korupsi, belajar dari rekam jejak bantuan sosial sebelumnya, sehingga masyarakat mempertanyakan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas program (Transparency International Indonesia, 2025). Di tengah dinamika ini, media sosial berperan penting sebagai sarana artikulasi protes dan pengawasan publik terhadap kebijakan pemerintah (Lim, 2013).

Dinamika respons dan gerakan protes publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada pembahasan ini akan menggunakan pendekatan aktivisme digital (digital activism) yang mencakup tiga tingkat hierarki: aktivitas penonton digital (digital spectator), aktivitas transisi digital (digital transitional), dan aktivitas gladiator digital (digital gladiator).

Digital Spectator

1. Clictivism

Bentuk kliktifisme dapat dilihat melalui penggunaan tagar oleh publik untuk mengumpulkan pendapat dan memperluas jangkauan kritik terhadap program MBG. Tagar memudahkan pengguna media sosial untuk menemukan informasi dan mendiskusikan masalah yang sama. Dapat dilihat melalui 3 unggahan akun Tiktok detik.com yang membahas viralnya pembagian MBG untuk ibu hamil dan balita dalam kemasan kantong plastik. Berdasarkan unggahan tersebut, unggahan tersebut memperoleh sekitar 19,3 ribu *likes*, 397 komentar, dan 1.418 kali dibagikan.

Gambar 2: Interaksi Pengguna TikTok terhadap Konten Pembagian MBG untuk Ibu Hamil dan Balita.



Sumber: TikTok detik.com

Interaksi tersebut menunjukkan adanya perhatian pengguna media sosial terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya terkait penyajian dan kelayakan kemasan makanan. Melalui tagar, kritik terhadap program dapat menjadi topik yang sedang tren dan menarik perhatian masyarakat dan pemerintah. Bentuk protes ini menunjukkan bahwa media sosial dapat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi opini publik (Lim, 2013). Banyak pengguna media sosial juga

membuat konten berupa video, postingan thread, meme, infografis, dan komentar yang berisi kritik terhadap program MBG. Isi kritik biasanya membahas ukuran anggaran program, masalah korupsi, dan efektivitas program dalam menangani masalah nutrisi. Di TikTok dan Instagram, misalnya, orang-orang membuat video pendek yang menjelaskan pandangan mereka tentang program tersebut. Sementara itu, di X (Twitter), pengguna sering membuat utas panjang yang berisi analisis dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan protes juga muncul dalam bentuk diskusi dan debat online. Orang-orang bertukar pandangan tentang kekuatan dan kelemahan program MBG. Diskusi ini melibatkan berbagai kelompok, termasuk mahasiswa, akademisi, aktivis, dan masyarakat umum. Meskipun ada perbedaan pendapat, diskusi di media sosial menunjukkan peningkatan partisipasi publik dalam memantau kebijakan publik (Suhantoro & Sufyanto, 2024).

Dalam laporan Drone Emprit setelah melakukan pengumpulan data dari Agustus - September 2026 melalui berbagai media sosial menunjukkan bahwa di platform X, sentimen negatif mendominasi hingga 89%. Warganet gencar mengkritik kebersihan dapur, skala prioritas anggaran bencana, hingga membagikan sindiran terkait pelaksanaan MBG. Dalam percakapan di Facebook terdapat banyak sentimen negatif dengan angka yang cukup tinggi mencapai 60,6% akibat kekhawatiran orang tua dan tuntutan penghentian program. Narasi positif (19,9%) didorong promosi resmi dan portal transparansi data. Praktik ini mendominasi melalui tingginya jumlah likes pada status atau video liputan pejabat daerah serta curahan hati dan empati untuk orang tua murid yang menjadi korban. Narasi pro di platform ini didorong oleh interaksi pada unggahan promosi resmi dan portal transparansi data. Sentimen negatif yang terjadi di Instagram menyentuh angka 63,8%, bersumber dari liputan korban keracunan dan aksi protes mahasiswa. Respons positif (19,4%) muncul dari testimoni siswa di daerah pelosok (Fahmi, 2026).

2. Metavoicing

Dalam aspek metavoicing, aktifisme digital terhadap program MBG dapat dilihat melalui unggahan akun Tiktok Dinamika Indonesia yang menampilkan video penolakan menu MBG oleh kepala sekolah di Salatiga.

Gambar 3: Interaksi Pengguna TikTok terhadap Konten Penolakan Menu MBG di Salatiga



Sumber: Tiktok Dinamika Indonesia (2026)

Berdasarkan unggahan video tersebut, konten ini memperoleh sekitar 19,1 ribu likes, 3.314 komentar, dan 3.122 kali dibagikan. Tingginya interaksi tersebut menunjukkan bahwa konten mengenai kualitas menu MBG mendapat perhatian dari pengguna media sosial. Melalui kolom komentar, pengguna dapat menyampaikan pendapat dan kritik, sedangkan fitur *share* memungkinkan konten tersebar kepada audiens yang lebih luas.

Gambar 4. Aktivitas menyebarkan ulang (*share, retweet*) di Platform X



Sumber: Media Sosial X 2026

Gambar menunjukkan unggahan video di platform X yang memuat grafik bergaya surat kabar dengan judul “Sekolah Mulai Tolak MBG, Siswa Sudah Ragu dengan Menu dari SPPG”. Unggahan ini merepresentasikan protes digital yang dikemas dalam format informasi semi-satir, dengan visual wadah makan sebagai penguat narasi. Interaksi berupa 264 *repost*, 412 *like*, dan 24 *reply* menunjukkan bahwa suara ini diamplifikasi oleh pengguna lain, sehingga kritik individual berkembang menjadi narasi kolektif sebagaimana dijelaskan dalam konsep *Metavoicing*.

3. Assertion

Melalui strategi asersi (*assertion*) para pengguna media sosial yang kritis terhadap MBG menyoroti program ini melalui penggunaan meme dan sindiran politik. Banyak pengguna membuat gambar atau video lucu yang berisi sindiran yang ditujukan pada program MBG atau pemerintah. Meskipun terlihat sederhana, meme memiliki dampak yang signifikan karena mudah dipahami dan menyebar dengan cepat di media sosial. Penggunaan humor dan sindiran politik sering digunakan untuk menyampaikan kritik tidak langsung terhadap pemerintah (Suhantoro & Sufyanto, 2024).

Gambar 5: Meme perbandingan isi paket Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari waktu ke waktu



Sumber: Instagram (2025)

Gambar 6: Meme kritik terhadap Program makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sindiran satiris



Sumber: Instagram (2025)

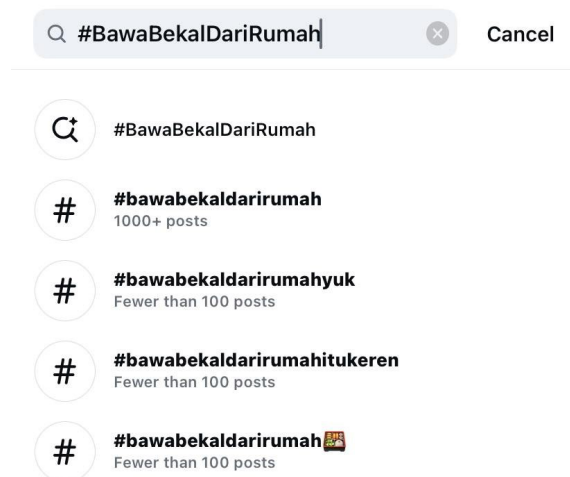
Konten kritik tidak hanya datang dari masyarakat umum tetapi juga dari influencer dan tokoh masyarakat, salah satunya adalah Chef Arnold Poernomo melalui akun X (Twitter)-nya. Dalam postingannya, Chef Arnold menyatakan bahwa program MBG sebenarnya memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Indonesia. Namun, dalam pandangannya, implementasi program masih memiliki banyak kekurangan. Pernyataan yang mengumpulkan diskusi paling banyak adalah: "Programnya bagus, tetapi eksekusinya kurang." Dia juga menyoroti beberapa masalah utama, seperti kualitas makanan, keamanan makanan, distribusi makanan, dan manajemen dapur, yang dinilai belum optimal (Sari, 2025).

Digital Transitional

1. Political consumerism

Dalam konteks Makan Bergizi Gratis (MBG), konsep ini digunakan untuk menganalisis aksi penolakan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial, termasuk ajakan untuk menolak mengkonsumsi MBG dan membawa bekal sendiri dari rumah. Ini bermula dari adanya penolakan dari sejumlah orang tua murid dan guru setelah muncul kasus dengan dugaan keracunan serta masalah kualitas makanan yang dibagikan. Menanggapi banyaknya laporan anak-anak sekolah yang keracunan setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG, komunitas orang tua murid dan guru ramai-ramai menyebarkan dokumentasi makanan tidak layak di media sosial. Gerakan #BawaBekalDariRumah dikampanyekan secara daring sebagai bentuk boikot mandiri agar anak-anak mereka terhindar dari resiko kesehatan.

Gambar 7: Tagar #BawaBekalDariRumah di platform X terhadap Program MBG di Media Sosial



Sumber: Instagram (2026)

Penggunaan tagar #BawaBekalDariRumah di media sosial menjadi salah satu bentuk ekspresi kritik masyarakat terhadap program MBG. Melalui tagar tersebut, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan menunjukkan sikap mereka terhadap kebijakan pemerintah. Gerakan ini dapat dipahami sebagai upaya masyarakat menggunakan pilihan konsumsi sehari-hari, yaitu membawa bekal dari rumah, untuk menunjukkan sikap politik terhadap suatu kebijakan. Dengan demikian, tindakan yang terlihat sederhana dapat menjadi simbol kritik dan partisipasi politik masyarakat di ruang digital. (Hajid, 2026)

2. Digital petitions

Beberapa anggota masyarakat menggunakan petisi online sebagai bentuk protes terhadap program MBG. Petisi digital biasanya meminta pemerintah untuk lebih transparan mengenai anggaran dan implementasi program. Petisi online memudahkan masyarakat untuk secara kolektif menyuarakan keprihatinan mereka karena mereka dapat ditandatangani oleh banyak orang melalui internet. Bentuk protes ini telah menjadi salah satu cara komunitas digital dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Salah satu petisi yang ditemukan adalah "Hentikan Program Makan Bergizi

Gratis!" Yang dibuat oleh Universitas BEM Airlangga melalui platform Change.org. Petisi tersebut dibuat pada 3 Juni 2026 dan berisi ajakan untuk menghentikan program MBG dan mendorong evaluasi pelaksanaannya. Dalam petisi, masalah transparansi dan akuntabilitas program juga disampaikan.

Gambar 8. Petisi "Hentikan Program Makan Bergizi Gratis!"



Sumber: [Change.org](https://change.org), 2026

Melalui petisi tersebut telah diperoleh puluhan ribu tanda tangan. Jumlah dukungan menunjukkan bahwa ada publik yang berpartisipasi mengungkapkan sikap mereka terhadap implementasi program MBG melalui ruang digital.

3. Botivism

Merespons dinamika kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media sosial, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengklaim bahwa sekitar 60% perbincangan kritis tersebut bukan berasal dari pengguna asli, melainkan digerakkan oleh akun otomatis atau bot yang

dikendalikan oleh pihak tertentu (Suara.com, 2026). Pernyataan ini memicu respons kritis dari kalangan pendidik, seperti Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G), Iman Zanatul Haeri, yang menegaskan bahwa dirinya bukan robot dan meminta pemerintah tidak menyalahkan akun palsu atau guru atas kritik yang disampaikan, melainkan fokus menyelesaikan persoalan substantif seperti kasus keracunan makanan di lapangan (Warta Ekonomi, 2026). Tuduhan bahwa sebagian besar percakapan MBG berasal dari akun bot juga tidak terbukti, melalui penggunaan akun otomatis yang terkoordinasi atau *buzzer* dalam gerakan protes digital terhadap program MBG

Dalam konteks E-Funding, tidak menemukan bukti pasti bahwa ada penggalangan dana secara online untuk membiayai kritik terhadap MBG.

Digital gladiator

Aktivitas Gladiator Digital merupakan bentuk aksi langsung (direct action) di mana warganet tidak sekadar berupaya memengaruhi opini, tetapi bertindak untuk menciptakan perubahan atau disrupti nyata terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam konteks penolakan MBG, aktivitas ini termanifestasi ke dalam bentuk Hacktivism, seperti kasus pengambilalihan situs web resmi DPRD Lebak pada pertengahan 2026. Para peretas (hacker) mengubah halaman utama (deface) situs tersebut dengan pesan terbuka yang menuntut penghentian segera program MBG karena dinilai membebani ruang fiskal dan memicu lonjakan utang negara (Budiman, 2026). Adapun terkait dengan aspek - aspek yang lain dalam digital gladiator ini seperti data aktivisme atau aktifisme data exposure (exposure) tidak ditemukan data yang relevan dalam kajian aktifisme digital terhadap isu MBG.

Gelombang penolakan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan transformasi nyata dalam cara publik merespons dan mengawasi kebijakan negara. Ruang siber dapat menjadi arena perlawanan bukan sekedar membuat konten hiburan semata tapi juga sarana politik mulai dari partisipasi pasif lewat *clicktivism* hingga peretasan situs pemerintah dan pembongkaran fakta lapangan sampai penggunaan Bot (Botivism) untuk menyampaikan protes terhadap pemerintah.

Resistensi yang begitu masif ini mampu bertahan tanpa ditopang oleh pendanaan digital (E-Funding) berskala besar. Ini menunjukkan bahwa kekecewaan publik terhadap prioritas anggaran dan ketidaksiapan infrastruktur sudah lebih dari cukup menjadi bahan bakar utama yang menghidupkan gerakan ini.

Pada akhirnya, fenomena aktivisme digital sebagai bentuk protes baru terhadap para pengambil kebijakan dapat memaksa pengambil kebijakan untuk beradaptasi dengan model pengawasan publik yang baru; di mana setiap celah implementasi akan langsung berhadapan dengan warga yang tidak segan mengambil peran sebagai para pelaku aktivis di dunia maya.

KESIMPULAN

Gerakan protes digital terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memperlihatkan transformasi partisipasi politik publik Indonesia melalui rekonfigurasi ranah siber menjadi arena kontestasi kebijakan. Berdasarkan kerangka aktivisme digital, penolakan publik terevaluasi secara bertingkat: pada level digital spectator, kritik terartikulasi melalui *clicktivism*, *metavoicing*, serta *assertion* berupa sindiran satiris dan analisis kritis yang mendominasi sentimen negatif di berbagai platform media sosial; pada tingkat digital transitional, resistensi mewujud dalam konsumerisme politik lewat kampanye boikot mandiri #BawaBekalDariRumah serta penggalangan puluhan ribu dukungan pada petisi digital; hingga ranah digital gladiator yang diwarnai aksi peretasan (*hacktivism*) terhadap situs resmi pemerintah lokal sebagai bentuk disrupti langsung.

Eskalasi protes mendasar ini dipicu oleh kekhawatiran substantif mencakup risiko keracunan makanan, efektivitas alokasi anggaran, ketidaktepatan sasaran, serta ancaman korupsi sistemik. Tanpa bergantung pada pendanaan digital (E-Funding) maupun manipulasi opini berbasis bot, masifnya gerakan organik ini menegaskan bahwa ketidakpuasan terhadap ketidaksiapan infrastruktur dan tata kelola program menjadi pendorong utama resistensi publik. Fenomena tersebut memaksa pembuat kebijakan untuk mengadaptasi model akuntabilitas baru di era digital, di mana efektivitas komunikasi publik, transparansi anggaran, serta tanggap terhadap masukan warga menjadi kuisial guna menjaga legitimasi kebijakan negara.

REFERENSI

- A, T. (2021). Kalijaga Journal of Communication. *Peran Sosial Media Pada Gerakan Protes Massa Aksi dan Demokrasi Baru di Era Milenial*, 3(1).
<https://doi.org/10.14421/kjc.31-02.2021>
- Abner, B. H., & Morin, J. P. H. (n.d.). Journal of Community Dedication. *Pengaruh Konten Digital terhadap Partisipasi Politik: Kajian Literatur tentang Aktivisme Media Sosial*, 5(1), 30-41.
<https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/1005>
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Indonesia (APJII). (2024, February 07). *asosiasi penyelenggara jasa internet indonesia (APJII)*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Retrieved May 8, 2026, from <https://apjii.or.id/>
- Attar, H. (2025, Agustus 19). *Mahasiswa Kritik Alokasi Anggaran Pendidikan Rp335 Triliun untuk MBG: Tak Jawab Akar Persoalan*. Retrieved Agustus 18, 2025, from <https://www.nu.or.id/nasional/mahasiswa-kritik-alokasi-anggaran-pendidikan-rp335-triliun-untuk-mbg-tak-jawab-akar-persoalan-as5Nm>
- Budiman. (2026, Mei 4). *Situs Web DPRD Lebak Diretas, Hacker Tulis Pesan Minta MBG Distop*. BeritaSatu.com.
<https://www.beritasatu.com/banten/2991143/situs-web-dprd-lebak-diretas-hacker-tulis-pesan-minta-mbg-distop>
- Elizamiharti, & Nelfira. (2024, Januari 1). *Demokrasi Di Era Digital: Tantangan dan Peluang Dalam Partisipasi Politik*. 2.
<https://risetpress.com/index.php/jimat/article/download/342/269/1514>
- Gabriel, S. A. (n.d.). Jurnal Dekonstruksi Jurnal Filsafat. *Tinjauan Kritis atas Berkembangnya Media Sosial dan Ancaman Terhadap Media Mainstream Menurut Manuel Castells*, 11(1), 6–16. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v11i01.288>

- George, J. J., & Leidner, D. E. (2019). From clicktivism to hacktivism: Understanding digital activism. *Information and Organization*, 29(2), 100249. <https://doi.org/10.1016/j.infoandorg.2019.04.001>
- Lim, M. (2013, Februari 11). *Many Clicks but littel sticks: social media activisme in indonesia*. taylor & francis online. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00472336.2013.769386>
- Lumbantobing, S. S., Rosdiana, D. S., Rahayu, A. D., & Fitriarningsih. (2025, Agustus 12). Studi Netnografi: Persepsi Netizen Indonesia Terhadap Program Makan Bergizi Gratis Tahun 2024. <https://repository.upi.edu/135441/>
- Maliati, N. (2023, Mei 12-19). Stunting dan Kebijakan Pangan dan Gizi di Indonesia. *Jurnal Transparansi Publik*, 3(1).
- Masita, M., Putri, S. M. M., & Haliq, A. (2025). TOFEDU: The Future of Education Journal. *Analysis of Netizen Hate Narratives on Tik Tok Social Media: Case Study of the Food Vlogger Controversy on the @codebluuuu Account*, 4(5), 1239–1249. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i5.546>
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya dan Siosioteknologi* – Penerbit Simbiosis. Penerbit Simbiosis. Retrieved May 8, 2026, from <https://penerbitsimbiosis.com/produk/media-sosial-perspektif-komunikasi-budaya-dan-siosioteknologi/>
- Nugroho, B. H. (2025, October 2). Digital activism and youth participation in Indonesia: A qualitative study of social media's role in contemporary social movements. *Priviet Social Sciences Journal*. DOI: <https://doi.org/10.55942/pssj.v5i10.603>
- Nurbani. (2020). Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA). *Aktivisme Sosial di Ruang Digital (Studi Kasus: Gerakan Peduli Lingkungan Melalui Akun Instagram @Saling.id)*, 3(1). <https://doi.org/10.32734/lwsa.v3i1.803>
- Paskarina, C. (2020). Digital activism and democracy in Indonesia: Learning from the foregoing research issues 2014-2020. *program makan bergizi gratis dan permasalahanya*. (2025). *kompas* TV.

<https://www.kompas.tv/kolom/642822/program-makan-bergizi-gratis-dan-permasalahan-annya>

Rahayuningsih, N. O. D., Aziz, S., & Akbar, M. (2025, Agustus 30). Digital activism and the movement toward social change: A systematic literature review of social media movements. *Jurnal Spektrum Komunikasi*, 13(3).

<https://mail.jurnal.stikosa-aws.ac.id/index.php/spektrum/article/view/1000>

Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025, Mei 28). Analisis Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis di Sekolah Dasar Indonesia Tahun 2025. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>

Rosita, D. K., & Mutia, P. R. (2025). Komunikatif: Jurnal Ilmiah Komunikasi. *Kritik Sosial Netizen terhadap Identitas LGBTQ+ dalam Ruang Digital: Studi Kasus @awbimax Authors*, 14(2), 208-223. 10.33508/jk.v14i2.7657

Safira, N., Khofifah, & razzaq, A. (2025, Desember). Peran Media Sosial dalam Membentuk Opini Publik: Kasus Keracunan Massal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di X (Twitter). 5(4).

<https://journalversa.com/s/index.php/jtpi/article/download/4915/5650/16825>

Saputri, A. A., & Utari, D. M. (2026). Efektivitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Status Gizi, Kesiapan Belajar, dan Luaran Pendidikan Peserta Didik: Tinjauan Sistematis. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 14(1).

<https://jurnal.stikescendekiautamakudus.ac.id/index.php/JKM/article/view/3045>

Sari, D. R. (2025, September 23). Chef Arnold Kritik Program MBG, Soroti Eksekusi Yang lemah. (<https://lifestyle.sindonews.com/read/1623837/187/chef-arnold-kritik-program-mbg-soroti-eksekusi-yang-lemah-1758604154>)

Suhantoro, I., & Sufyanto. (2024, Agustus). Meme sebagai Katasiliator Politik di Media Sosial Indonesia. 1(2). <https://journal.pubmedia.id/index.php/interaction/article/view/2887>

Suwana, F. (2019, January 08). What motivates digital activism? The case of the Save KPK movement in Indonesia. 1295-1310. <https://doi.org/10.1080/1369118X.2018.1563205>

Transparency International Indonesia. (2025, Juni 30). *Program Makanan Bergizi Gratis dikepung Risiko Korupsi Sistemik*.

<https://ti.or.id/program-makan-bergizi-gratis-dikepung-risiko-korupsi-sistemik/>

Zordi, D. A., Ihsan, M. S., Nazarudin, M. A., & Patrianti, T. (2026, Januari 1). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini dan Dinamika Kebijakan Pemerintah di Era Digital. 3(1).

<https://ejournal.appisi.or.id/index.php/Komunikasi/article/download/882/643/4941>